S. RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 serta penggantinya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang menyusun Rencana Kerja (Renja). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Sebagaimana Peraturan Walikota Malang Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2026 dalam menyusun Renja Perangkat Daerah arah kebijakan menyesuaikan tema RKPD yaitu Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan serta perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesusai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perangkat Daerah menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;
27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030;
28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2024 -2026 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2023 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran daerah Kota Malang Tahun 2024 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang tahun 2024 Nomor 7 );
31. Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
32. Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2023 Nomor 22);
33. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2023 Nomor 30);
34. Peraturan Walikota Malang Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2025 Nomor );
35. Surat Edaran Walikota Malang Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2026, antara lain untuk :

1. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya ;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program ;
3. Menyelaraskan program dengan penganggaran ;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan ;
5. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun 2026;
2. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2026;
3. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

* 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review ini didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan perkiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Kerja (DPA-Perangkat Daerah) tahun berjalan yang baru beberapa bulan dilaksanakan.

Sesuai dengan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahap Penyajian Rancangan Renja Perangkat Daerah, apabila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Pencapaian target kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan. berupa indikator-indikator tertentu dengan target-target kinerja sebagai instrumen penilaian. Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang selain mempunyai tugas pokok dan fungsi juga melakukan fungsi koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Oleh karena itu, untuk mendukung capaian kinerja Pemerintah Kota Malang mengacu pada Rencana Strategis ( Renstra ) BKAD Tahun 2024 – 2026 dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah ( RPD ) Kota Malang Tahum 2024-2026 fokus tahun ketiga (3). Sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 - 2026, dimana tujuan BKAD sebanyak 1 (satu) yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien dan sasaran sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan indikator sasaran yaitu :

1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Persentase Kontribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Terhadap PAD
3. Nilai SAKIP

Tingkat capaian efektifitas dan efisiensi program/ kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang pencapaian sasaran dituangkan ke dalam 3 (tiga) program dan 14 (empat belas) kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan sebagaimana dilihat pada tabel 2.1.1 berikut:

Tabel 2.1.1

Realisasi Target Anggaran dan Kinerja Per Program Per Kegiatan Per Sub Kegiatan Tahun 2024

| **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **KINERJA** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Target** | | **Realisasi** | | **Capaian (%)** |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu** |  | **100%** |  | **100%** | **100%** |
| **Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik** |  | **100%** |  | **100%** | **100%** |
| **Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu** |  | **100%** |  | **100%** | **100%** |
| **Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan** |  | **100%** |  | **100%** | **100%** |
| **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan** |  | **100%** |  | **100%** | **100%** |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 | Dokumen | 8 | Dokumen | 80.00% |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 | Laporan | 3 | Laporan | 100.00% |
| **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu** |  | **100%** |  | **100%** | **100%** |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 57 | Orang/bulan | 57 | Orang/bulan | 83.33% |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 500 | Dokumen | 656 | Dokumen | 131.20% |
| **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Persentase barang milik daerah yang terinventarisir** |  | **100%** |  | **100%** | **100.00%** |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100.00% |
| **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian** |  | **100%** |  | **100%** | **100%** |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 6 | Dokumen | 6 | Dokumen | 100.00% |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 132 | Orang | 132 | Orang | 100.00% |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 80 | Orang | 80 | Orang | 100.00% |
| **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi** |  | **100%** |  | **100%** | **100%** |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | Paket | 1 | Paket | 100.00% |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 | Paket | 6 | Paket | 100.00% |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 | Paket | 0 | Paket | 0.00% |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 | Paket | 2 | Paket | 100.00% |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 | Dokumen | 3 | Dokumen | 83.33% |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 | Laporan | 105 | Laporan | 87.50% |
| **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD** |  | **100%** |  | **100%** | **100%** |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 | Unit | 6 | Unit | 100.00% |
| **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti** |  | **100%** |  | **100%** | **100%** |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 24 | Laporan | 20 | Laporan | 83.33% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 | Laporan | 3 | Laporan | 83.33% |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 | Laporan | 2 | Laporan | 100.00% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 | Laporan | 1 | Laporan | 83.33% |
| **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase barang milik daerah yang terpelihara** |  | **100%** |  | **100%** | **100%** |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 34 | Unit | 29 | Unit | 85.29% |
| Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 | Unit | 1 | Unit | 100.00% |
| **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan** |  | **100%** |  | **100%** | **100%** |
| **Persentase Pelayanan Perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan** |  | **100%** |  | **100%** | **100%** |
| **Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI** |  | **100%** |  | **100%** | **100%** |
| **Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | **Persentase Perangkat Daerah yang meng-input penganggaran tepat waktu,selaras dan sesuai perencanaan** |  | **100%** |  | **100%** | **100%** |
| Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 | Dokumen | 2 | Dokumen | 100.00% |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 2 | Dokumen | 2 | Dokumen | 100.00% |
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0.00% |
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 | Dokumen | 2 | Dokumen | 100.00% |
| Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 4 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0.00% |
| Pembinaan penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 132 | Orang | 0 | Orang | 0.00% |
| **Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **Persentase kesesuaian proses penerbitan SP2D dengan ketentuan yang berlaku** |  | **100%** |  | **100%** | **100%** |
| Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 12 | Dokumen | 10 | Dokumen | 83.33% |
| Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 56 | Dokumen | 56 | Dokumen | 100.00% |
| Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 12 | Dokumen | 10 | Dokumen | 83.33% |
| Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 12 | Dokumen | 10 | Dokumen | 83.33% |
| Pembinaan Penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 190 | Orang | 190 | Orang | 100.00% |
| **Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **Penyampaian L/K Pemda yang tepat waktu** |  | **tepat waktu** |  | **tepat waktu** | **100%** |
| Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 7 | Laporan | 7 | Laporan | 100.00% |
| Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 2 | Dokumen | 2 | Dokumen | 100.00% |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 4 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0.00% |
| Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 190 | Orang | 0 | Orang | 0.00% |
| **Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **Persentase terpenuhinya dana darurat dan mendesak** |  | **100%** |  | **80%** | **80%** |
| Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 5 | Laporan | 4 | Laporan | 80.00% |
| **Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** | **Persentase ketersediaan data dalam Implementasi Sistem informasi Pemerintahan Daerah** |  | **100%** |  | **0%** | **0.00%** |
| Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 190 | Orang | 0 | Orang | 0.00% |
| **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **Kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah, gedung dan bangunan** |  | **15,5 M** | **19.026.628.047,50** | | **122.75%** |
| **Persentase Laporan BMD SKPD yang sesuai dengan ketentuan** |  | **100%** |  | **100%** | **100.00%** |
| **Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **Persentase data Barang Milik Daerah yang akurat sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya** |  | **100%** |  | **100%** | **100.00%** |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100.00% |
| Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2 | Dokumen | 2 | Dokumen | 100.00% |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 12 | Laporan | 10 | Laporan | 83.33% |
| Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 1 | Laporan | 1 | Laporan | 100.00% |
| Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 3 | Laporan | 3 | Laporan | 83.33% |
| Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 10 | Laporan | 10 | Laporan | 100.00% |
| Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2 | Laporan | 2 | Laporan | 100.00% |
| Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 150 | Dokumen | 182 | Dokumen | 121.33% |
| Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 132 | Laporan | 132 | Laporan | 100.00% |
| Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 2 | Laporan | 1 | Laporan | 50.00% |
| Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 132 | Orang | 132 | Orang | 100.00% |

Sebagaimana tabel 2.1.1 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan;

Adapun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil keluaran pada renstra yang direncanakan adalah:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini hanya terealisasi sebesar 117 kali dari target pada renstra 120 kali sehingga hanya tercapai 97,50%.

1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
3. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Kegiatan ini hanya terealisasi sebesar 4 Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dari target pada renstra 6 Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran sehingga hanya tercapai 66,67%.

1. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

Kegiatan ini hanya terealisasi sebesar 0 dokumen dari target pada renstra 4 Dokumen sehingga hanya tercapai 0%.

1. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan;

Adapun Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran pada renstra yang direncanakan adalah:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 2 dokumen dari target pada renstra sebesar 2 dokumen.

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 8 dokumen dari target pada renstra sebesar 8 dokumen.

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 14 dokumen dari target pada renstra sebesar 14 dokumen.

1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 12 dokumen dari target pada renstra sebesar 12 dokumen.

1. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 12 dokumen dari target pada renstra sebesar 12 dokumen.

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 80 Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dari target pada renstra sebesar 80 Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi 1 paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dari target pada renstra sebesar 1 paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi 6 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dari target pada renstra sebesar 6 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.

1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi 1 Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan dari target pada renstra sebesar 1 Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan.

1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi 1 Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan dari target pada renstra sebesar 1 Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan.

1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 3 Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dari target pada renstra sebesar 3 Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.

1. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 14 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dari target pada renstra sebesar 14 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 1 Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan dari target pada renstra sebesar 1 Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan.

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 1 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari target pada renstra sebesar 1 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 3 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dari target pada renstra sebesar 3 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.

1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 1 Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dari target pada renstra sebesar 1 Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.

1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 1 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dari target pada renstra sebesar 1 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

1. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 38 unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dari target pada renstra sebesar 38 unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.

1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
3. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 2 Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun dari target pada renstra sebesar 2 Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun.

1. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 2 Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun dari target pada renstra sebesar 2 Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun.

1. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi 2 Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dari target pada renstra 2 Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

1. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi 2 Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dari target pada renstra 2 Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.

1. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 6 Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dari target pada renstra sebesar 6 Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.

1. Pembinaan penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 132 Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dari target pada renstra sebesar 132 Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

1. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
2. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 12 Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dari target pada renstra sebesar 12 Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.

1. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 516 Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dari target pada renstra sebesar 516 Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.

1. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 12 Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dari target pada renstra sebesar 12 Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

1. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 12 Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dari target pada renstra sebesar 12 Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

1. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 1 Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan dari target pada renstra sebesar 1 Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

1. Pembinaan Penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 190 Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dari target pada renstra sebesar 190 Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

1. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 7 Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi dari target pada renstra sebesar 7 Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi.

1. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 2 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dari target pada renstra sebesar 1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun.

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 4 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah dari target pada renstra sebesar 4 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah.

1. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 1 Dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dari target pada renstra sebesar 1 Dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 5 Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dari target pada renstra sebesar 5 Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
2. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 132 Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dari target pada renstra sebesar 132 Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

1. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 12 dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah dari target pada renstra 12 dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah.

1. Inventarisasi Barang Milik Daerah

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 1 Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah dari target pada renstra sebesar 1 Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah.

1. Pengamanan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 3 Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah dari target pada renstra sebesar 3 Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah.

1. Penilaian Barang Milik Daerah

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 10 Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah dari target pada renstra sebesar 10 Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah.

1. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 2 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dari target pada renstra sebesar 2 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 132 Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari target pada renstra sebesar 132 Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

1. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 2 Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun dari target pada renstra 2 Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun.

1. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 132 Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dari target pada renstra sebesar 132 Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

1. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil Keluaran yang direncanakan;

Adapun Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil Keluaran pada renstra yang direncanakan adalah:

1. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini terealisasi sebesar 4 Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah dari 2 Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah dari target renstra sehingga tercapai 200%

1. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini terealisasi sebesar 210 Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dari target renstra 150 Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sehingga tercapai 140%

1. Faktor-faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Solusi Penyelesaiannya;

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi BKAD Kota Malang selaku koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah. maka keberhasilan pelaksanaan suatu program kegiatan sangat dipengaruhi beberapa faktor baik faktor internal maupun eksternal yang berdampak belum optimal capaian kinerja Satuan Kerja SKPD (Perangkat Daerah) dan/atau bahkan seolah-olah ada kesan perencanaan anggaran dari program kegiatan kurang maksimal. Secara umum dapat diinformasikan beberapa kendala/permasalahan yang perlu diantisipasi terkait dengan belum optimalnya capaian kinerja Perangkat Daerah antara lain :

1. Capaian kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendukung Opini BPK RI mencapai 100% dengan 13 (tiga belas) kali pertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Secara umum laporan keuangan telah memenuhi kriteria :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP );
2. Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset.

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi/ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyusun regulasi penganggaran, penatausahaan dan pertanggyngjawaban/pelaporan pengelolaan keuangan daerah antara lain:

1. Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
2. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Dan/Atau Alat Berat;
3. Peraturan Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah;
4. Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial;
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (BTT);
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah ( KKPD) dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Sistem Akuntansi dan Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Kebijakan Akuntansi sebagai pengganti PeraturanWalikota Malang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi. Sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Malang secara bertahap menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP ) Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi SAP Berbasis Akrual.

Meski demikian dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK - RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2023, terdapat beberapa cacatan khususnya terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga dilakukan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas manajemen aset oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur yaitu:

1. Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada BKAD tidak sesuai ketentuan
2. Penatausahaan Tetap Tidak Tertib; merekomendasikan:
3. Segera melakukan pemutakhiran data wajib retribusi tanah IP dan segera menerapkan Perda nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah atas tanah IP yang memenuhi syarat sebagai obyek sewa;
4. Selaku Ketua Tim Hibah Daerah supaya segera melakukan penelitian administratif dan fisik atas obyek hibah secara cermat dan memproses pelaksanaan hibah sesuai ketentuan;
5. Selaku Pengguna Barang supaya menginstruksikan Pengurus Barang untuk segera mengatribusikan kegiatan perencanaan, pengawasan dan rehabilitasi/renovasi ke aset induknya
6. Selaku Pengguna Barang supaya menginstruksikan Pengurus Barang untuk melengkapi informasi KIBAR gedung dan bangunan

Atas catatan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) diatas Badan Keuangan dan Aset Daerah telah:

1. Menyusun regulasi pengelolaan keuangan dan kebijakan penganggaran daerah antara lain:
2. Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Malang;
3. Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Malang
4. Menyusun kebijakan Kepala Daerah terkait pengelolaan Barang Milik Daerah setelah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain :
5. Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah
6. Peraturan Walikota Nomor 25 tahun 2021 tentang Tata Cara Cara Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7. Peraturan Walikota Nomor 26 tahun 2021 tentang Tata Cara Penilaian dan Pemimdahtanganan Barang Milik Daerah
8. Peraturan Walikota Nomor 27 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
9. Peraturan Walikota Nomor 28 tahun 2021 Ranperwal tentang Tata Cara Pengadaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah
10. Rancangan Peraturan Walikota Malang Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah
11. Rancangan Peraturan Walikota Malang Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Kerjasama Penyedia Infrastruktur Atas Barang Milik Daerah
12. Rancangan Peraturan Walikota Malang Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah
13. Rancangan Peraturan Walikota Malang Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bangun Guna Serah Atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah
14. Melakukan upaya-upaya dalam rangka penertiban pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain:
15. Melakukan validasi dan konsolidasi data aset tanah Ijin Pemakaian dalam aplikasi sistem manajemen aset daerah dengan data/pencatatan obyek IP pada Data Wajib Retribusi; selanjutnya dilakukan rekonsiliasi atas hasil inventarisasi dan Neraca Pemerintah Kota Malang sehingga akan menjadi Data Tunggal/SIN ( Single Identification Number);
16. Melakukan rekonsiliasi pencatatan asset PSU dengan asset tanah bawah jalan dan asset tanah di bawah irigasi
17. Melakukan pemisahan pencatatan KIB Gedung dan bangunan antara komponen bangunan fisik, penunjang utama dan penunjang lainnya.
18. Pemutakhiran aplikasi SIMBADA yang mendukung penyajian asset tetap secara andal
19. Melakukan verifikasi dan validasi piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah.
20. Segera melakukan pemutakhiran data wajib retribusi tanah IP dan segera menerapkan Perda nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah atas tanah IP yang memenuhi syarat sebagai obyek sewa;
21. Selaku Ketua Tim Hibah Daerah supaya segera melakukan penelitian administratif dan fisik atas obyek hibah secara cermat dan memproses pelaksanaan hibah sesuai ketentuan;
22. Selaku Pengguna Barang supaya menginstruksikan Pengurus Barang untuk segera mengatribusikan kegiatan perencanaan, pengawasan dan rehabilitasi/renovasi ke aset induknya
23. Selaku Pengguna Barang supaya menginstruksikan Pengurus Barang untuk melengkapi informasi KIBAR gedung dan bangunan
24. Menyusun petunjuk teknis terkait kebijakan akuntansi antara lain :
25. Petunjuk teknis terkait mekanisme pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang tidak melalui RKUD dan hibah langsung baik uang maupun barang yang diterima Perangkat Daerah
26. Pencatatan piutang BPJS khususnya perlakuan akuntansi atas selisih pengakuan dan pencatatan piutang berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh BPJS
27. Perlakuan atas penilaian asset tetap yang sebelumnya belum disajikan sesuai harga wajar
28. Invenstasi permanen dan pendapatan yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dicatat sebesar nilai laba perusahaan sesuai SAP
29. Adanya beberapa update peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu untuk mendukung kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi lebih baik, maka sebelum menyusun dan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan perlu membangun komunikasi yang lebih intensif antar K/L/D/I dengan pemerintah daerah atau lembaga teknis sebagai pelaksana kebijakan serta dilakukan kajian dan analisa yang komprehensif terhadap outcome, benefit dan impact apabila peraturan tersebut diterapkan;
30. Masih adanya pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan utamanya tentang pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya advokasi /pembinaan, bimtek/pelatihan/TOT dan pendampingan kepada para pengelola keuangan dan aset daerah SKPD dan/atau mengikutsertakan aparatur dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis. Dengan demikian diharapkan aparatur dapat bersinergi demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
31. Inovasi dan model-model aplikasi baru terkait pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan sebagai amanat peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat sangat membutuhkan ketrampilan, keahlian, dan pengetahuan yang memadai bagi aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah. Namun demikian pencapaian inovasi tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa karena dapat berpengaruh pada sistem pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan yang terintegrasi dengan SIPD yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri. SIPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 merupakan Sistem Informasi Yang Memuat Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Keungan Daerah, serta Sistem Pemerintahan Daerah yang lain termasuk Sistem Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;
32. Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui aplikasi SIMBADA masih memerlukan penyempurnaan. Mapping yang dilakukan Perangkat Daerah banyak mengalami kesulitan pada pencatatan persediaan terutama pada barang habis pakai yang teranggarkan pada masing-masing kegiatan. Hasil mapping memastikan data barang milik daerah telah sesuai dengan Neraca. Untuk itu diadakan pengembangan data base / aplikasi SIMBADA menuju versi Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
33. Belum optimalnya kemampuan Perangkat Daerah dalam hal ini Subag Umum selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD dan Pengurus Barang Perangkat Daerah dalam pemahaman software aplikasi penatausahaan dan Laporan Barang Milik Daerah. Pemecahannya adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis serta asistensi /pendampingan kepada Satuan Kerja SKPD ( Perangkat Daerah ) di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Beberapa permasalahan yang diketengahkan merupakan kondisi yang masih terjadi dalam rangka aplikasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan aturan pelaksanaannya. Sehingga dipandang perlu untuk terus melakukan pendampingan dan asistensi bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah.

1. Persentase tanah aset daerah yang telah bersertifikat sampai dengan tahun 2023 mencapai 20,07% (1710 bidang dari jumlah bidang seluruh aset daerah sebanyak 8.264). Pada Tahun 2023 sertifikat dalam proses pengajuan mencapai 974 bidang. Sehingga total tanah asset yang belum bersertifikat sebanyak 5.580 bidang. dengan luasan tanah yang bersertifikat 3.682.534 m2 dari total 13.723.701 m2. Kondisi tersebut terjadi kurang lebih masih banyak tanah yang merupakan aset Pemerintah Kota Malang tetapi tidak didukung/belum didukung data yang otentik, sehingga diperlukan penelusuran dan identifikasi aset, disertai penetapan alas hak-nya sebelum melakukan pendaftaran ke BPN untuk proses sertifikasi/status hukum asetnya.
2. Belum terbangun data single/data tunggal tanah aset daerah. Sampai saat ini belum tersusun roadmap dan mekanisme yang jelas dan terukur untuk konsolidasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan SIN ( Single Identification Number )/ Nomor Tunggal Identitas aset tanah pada semua database dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah yang lebih akurat serta dalam rangka pencapaian Data Tunggal atas 4 (empat) database yang berbeda yaitu:
3. Data base tanah pada Neraca Pemerintah Kota Malang;
4. Database Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah (SIPIPT);
5. Database Retribusi Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
6. Database hasil Inventarisasi Tanah Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah.
7. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah;
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan tercapainya target program, maka pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah berjalan dengan optimal sehingga mendukung nilai capaian dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu.

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan tercapainya target program, maka pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah berjalan dengan optimal sehingga mendukung nilai capaian Laporan Keuangan SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI.

1. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dengan tercapainya target program, maka pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah berjalan dengan optimal sehingga mendukung nilai capaian Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD.

1. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

1) Pelayanan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah saat ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Walikota Malang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2020-2023 ( sasaran 2: Prioritas yang harus terus dipelihara (a) Mempertahankan opini WTP dari BKP )

Sistem pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penganggaran

Perencanaan penyusunan anggaran disusun berdasarkan Rancangan Rencana Kerja ( Renja ) SKPD yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) dan tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), untuk disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Malang. Selanjutnya berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD ) yang telah disetujui disusun Rencana Kegiatan dan Anggaran ( RKA ) diinput kedalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( SIPD ) sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD. Selanjutnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian obyek diserta rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran data serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elekronik.

PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-SKPD yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

* + 1. Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Penyiapan Anggaran Kas; Kepala SKPD Menyusun rencana anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan.
2. PPKD menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan APBD dengan mempertimbangkan :
3. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
4. Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
5. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD
6. Penerimaan dan Penyetoran pendapatan
7. Rekonsiliasi Penerimaan
8. Penyetoran Pendapatan
9. Penatausahaan keuangan
10. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja
11. Permintaan Pembayaran
12. Perintah Membayar
13. Perintah Pencairan Dana
14. Penyampaian Laporan Pertanggngjawaban Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
    * 1. Pelaporan

Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah system yang mampu mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pilar utama pengembangan akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan system akuntansi.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan Akuntansi tersebut disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelanggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah mengamanatkan penyajian laporan keuangan terdiri atas :

I. Entitas Akuntasi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/SKPD), terdiri atas :

1) Laporan Realisasi Anggaran ( LRA );

2) Neraca;

3) Laporan Operasional ( LO );

4) Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ); dan

5) Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK)

II. Entitas Pelaporan ( SK-PKD ) terdiri atas :

1) Laporan Realisasi Anggaran ( LRA );

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ( LPSAL);

3) Neraca;

4) Laporan Operasional ( LO );

5) Laporan Arus Kas ( LAK);

6) Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ); dan

7) Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK ).

Melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi, sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Malang secara bertahap menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP ) Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi SAP Berbasis Akrual.

Manfaat penggunaan basis akuntansi akrual bagi Pemerintah Daerah antara lain :

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah;
3. Pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah daerah lebih baik;
4. Bermanfaat dalam hal mengevaluasi kinerja pemerintah daerah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

2) Pelayanan Aset Daerah

Beberapa langkah dalam manajemen aset pemerintah daerah meliputi: inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pemanfaatan aset serta pengawasaan serta pengendalian. Pengelolaan aset daerah merujuk kepada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Beberapa dapat diketengahkan terkait pelayanan pengelolaan aset daerah sebagai berikut:

1. Kompleksitas permasalahan-permasalahan pengelolaan Barang Milik Daerah melatarbelakangi diterbitkannya Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah yang memuat bagaimana mekanisme pencatatan pemanfaatan BMD dan penyajian Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu. Hasil laporan dalam penatausahaan BMD digunakan sebagai bahan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Output yang sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah adalah penatausahaan BMD melalui aplikasi e-BMD dalam satu system :
2. Persediaan (penerimaan, penyaluran persediaan)
3. Aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan irigasi, asset tetap lainnya, KDP)
4. Asset lainnya (Kemitraan pihak ketiga, ATB, asset lain-lain)
5. Akumulasi penyusutan/amortisasi,

sistem aplikasi e-BMD dengan output yang dihasilkan sudah mencerminkan seluruh format laporan sebagaimana telah diatur dalam Permendagri 47 Tahun 2021.

1. Aspek legal yang jelas menjadi sangat penting atas status, luas dan harga tanah dan bangunan guna penilaian aset pada aktiva tetap neraca daerah. Nilai aset yang dicantumkan dalam neraca daerah masih merupakan nilai histories/nilai buku, sehingga diperlukan penilaian aset kembali untuk mendapatkan nilai pasar dari seluruh aset yang dimiliki pemerintah daerah. Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya.
2. Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimilik/dikelola/dikuasai pemerintah daerah yang mempunyai nilai ekonomis menjadi perhatian serius, sebagai perwujudan atas pelayanan publik (public service), pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka: penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun; Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah ( RKBMD ) dan Perencanaan Pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah ( RKPBMD) setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran; pengamanan administratif terhadap barang milik negara/daerah.
3. Terhadap dokumen benda-benda berharga dan aset daerah yang diinventarisasi, disimpan melalui sistem penataan arsip. Pada tahun 2013 telah dilakukan update dan pengembangan data SIGMA (Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset), dimana dalam sistem aplikasi ini data/obyek tersimpan berupa data tekstual maupun spacial yang dilengkapai titik-titik ordinat pada masing-masing obyek dan dapat diakses menggunakan perangkat berbasis Android. Penatausahaan pemanfaatan aset daerah berupa tanah dan atau bangunan tersimpan dalam aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah (SIPIPT), dimana tanah aset daerah terarsipkan per obyek dengan data tersaji secara tekstual dan spacial (obyek tersaji riil dilengkapi foto/dokumentasi serta peta).
4. Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 5 (lima ) Peraturan Walikota dan 4 (empat) Rancangan Peraturan Walikota sebagai pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan penjelasan implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, maka pada tahun 2024 perlu dilakukan:

1. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang mendukung capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang mendukung capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang mendukung capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang mendukung capaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang mendukung capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
7. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
8. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
9. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang mendukung capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
10. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang mendukung capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
11. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang mendukung capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
12. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang mendukung capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
13. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang mendukung capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
14. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang mendukung capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
15. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang mendukung capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
16. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang mendukung capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
17. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang mendukung capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
18. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang mendukung capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
19. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang mendukung capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
20. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendukung capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
21. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang mendukung capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
22. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
23. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
24. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
25. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
26. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
27. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
28. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
29. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
30. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
31. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
32. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
33. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
34. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
35. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
36. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
37. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
38. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
39. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang mendukung capaian Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
40. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
41. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyusunan Standar Harga yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
42. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
43. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
44. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
45. Merencanakan dan menganggarkan sub Inventarisasi Barang Milik Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
46. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
47. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
48. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
49. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
50. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
51. Merencanakan dan menganggarkan sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tabel 2.1.2 - Lampiran TC 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah

| **Kode Program/ Kegiatan** | | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program/Kegiatan** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026** | **Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023** | **Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2024** | | | **Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024** | **Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025** | **Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2025)** | **Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)** |
|  |  |  |  |  | **KEUANGAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **02** | **01** |  |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **0%** | **0%** |
| **Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **0%** | **0%** |
| **Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **0%** | **0%** |
| **Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **0%** | **0%** |
| **5** | **02** | **01** | **2.01** |  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **0%** | **0%** |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | 2 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 100% | 10 Dokumen | 0 Dokumen | 0.00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | 1 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | 100% | 3 Laporan | 0 Laporan | 0.00 |
| **5** | **02** | **01** | **2.02** |  | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **0%** | **0%** |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 47 Orang/bulan | 52 Orang/bulan | 57 Orang/bulan | 57 Orang/bulan | 100% | 47 Orang/bulan | 0 Orang/bulan | 0.00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 500 dokumen | 12 Dokumen | 500 Dokumen | 656 Dokumen | 131.20% | 500 Dokumen | 0 Dokumen | 0.00 |
| **5** | **02** | **01** | 2.03 |  | **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD** | **Persentase barang milik daerah yang terinventarisir** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **0%** | **0%** |
| 5 | 02 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 12 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0.00 |
| **5** | **02** | **01** | **2.05** |  | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **0%** | **0%** |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 6 Dokumen |  | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100% | 6 Dokumen | 0 Dokumen | 0.00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 132 Orang |  | 132 Orang | 132 Orang | 100% | 132 Orang | 0 Orang | 0.00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 80 Orang | 80 orang | 80 orang | 80 orang | 100% | 80 orang | 0 orang | 0.00 |
| **5** | **02** | **01** | **2.06** |  | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **0%** | **0%** |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100% | 1 Paket | 0 Paket | 0.00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 6 Paket | 6 Paket | 6 Paket | 100% | 4 Paket | 0 Paket | 0.00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 0 Paket | 0% | 1 Paket | 0 Paket | 0.00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 1 Paket | 2 Paket | 2 Paket | 100% | 2 Paket | 0 Paket | 0.00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% | 3 Dokumen | 0 Dokumen | 0.00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 Laporan | 117 Laporan | 120 Laporan | 105 Laporan | 87.50% | 120 Laporan | 0 Laporan | 0.00 |
| **5** | **02** | **01** | **2.07** |  | **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **0%** | **0%** |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 14 jenis | 6 Unit | 6 Unit | 100% | 5 Unit | 0 Unit | 0.00 |
| **5** | **02** | **01** | **2.08** |  | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **0%** | **0%** |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 24 Laporan | 1 Laporan | 24 Laporan | 24 Laporan | 100% | 24 Laporan | 0 Laporan | 0.00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | 100% | 3 Laporan | 0 Laporan | 0.00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 1 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% | 2 Laporan | 0 Laporan | 0.00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 0 Laporan | 0.00 |
| **5** | **02** | **01** | **2.09** |  | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase barang milik daerah yang terpelihara** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **0%** | **0%** |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 34 Unit | 38 Unit | 34 Unit | 29 Unit | 100% | 34 Unit | 0 Unit | 0.00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit |  | 1 unit | 1 unit | 100% | 1 unit | 0 Unit | 0.00 |
| **5** | **02** | **02** |  |  | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **0%** | **0%** |
| **Persentase Pelayanan Perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **0%** | **0%** |
| **Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **0%** | **0%** |
| **5** | **02** | **02** | **2.01** |  | **Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | **Persentase Perangkat Daerah yang menginput penganggaran tepat waktu dan selaras dengan perencanaan** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **0%** | **0%** |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0.00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0.00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0.00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0.00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 0 Dokumen | 0% | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0.00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 13 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 132 Orang | 132 Orang | 132 Orang | 132 Orang | 100% | 132 Orang | 0 Orang | 0.00 |
| **5** | **02** | **02** | **2.02** |  | **Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **Persentase kesesuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **0%** | **0%** |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | 12 Dokumen | 0 Dokumen | 0.00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 56 Dokumen | 516 Dokumen | 56 Dokumen | 56 Dokumen | 100% | 56 Dokumen | 0 Dokumen | 0.00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | 12 Dokumen | 0 Dokumen | 0.00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 06 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | 12 Dokumen | 0 Dokumen | 0.00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0% | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0.00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 190 Orang | 190 Orang | 190 Orang | 190 Orang | 100% | 190 Orang | 0 Orang | 0.00 |
| **5** | **02** | **02** | **2.03** |  | **Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **Penyampaian L/K Pemda yang tepat waktu** | **tepat waktu** | **tepat waktu** | **tepat waktu** | **tepat waktu** | **tepat waktu** | **tepat waktu** | **-** | **-** |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 7 Laporan | 7 Dokumen | 7 Laporan | 7 Dokumen | 100% | 7 Laporan | 0 Dokumen | 0.00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0.00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 07 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 4 Dokumen | 1 dokumen | 4 Dokumen | 0 dokumen | 25% | 1 Dokumen | 0 dokumen | 0.00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 0 dokumen | 0 Dokumen | 0 dokumen | 0% | 1 Dokumen | 0 dokumen | 0.00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 190 orang |  | 190 orang | 0 orang | 0% | 190 orang | 0 orang | 0.00 |
| **5** | **02** | **02** | **2.04** |  | **Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **Persentase terpenuhinya dana darurat dan mendesak** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **0%** | **0%** |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 5 Laporan | 5 Laporan | 5 Laporan | 5 Laporan | 100% | 5 Laporan | 0 Laporan | 0.00 |
| **5** | **02** | **02** | **2.05** |  | **Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** | **Persentase ketersediaan data dalam Implementasi Sistem informasi Pemerintahan Daerah** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **0%** | **0%** |
| 5 | 02 | 02 | 2.05 | 03 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 190 Orang | 132 entitas | 190 Orang | 190 Orang | 100% | 190 Orang | 0 Orang | 0.00 |
| **5** | **02** | **03** |  |  | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **Kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah, gedung dan bangunan** | **15,5M** | **2.06%** | **15,5M** | **19.03M** | **122.75%** | **16.5M%** | **0.00%** | **0.00** |
| **Persentase Laporan BMD SKPD yang sesuai dengan ketentuan** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **0%** | **0%** |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 |  | **Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **Persentase data Barang Milik Daerah yang akurat sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **0%** | **0%** |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 1 Dokumen |  |  |  |  | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0.00 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen |  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0.00 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 04 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0.00 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 0 Laporan | 0.00 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 0 Laporan | 0.00 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 3 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | 100% | 3 Laporan | 0 Laporan | 0.00 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 08 | Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 10 Laporan | 10 Laporan | 10 Laporan | 10 Laporan | 100% | 10 Laporan | 0 Laporan | 0.00 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 09 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% | 1 Laporan | 0 Laporan | 0.00 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 150 Dokumen | 210 Dokumen | 150 Dokumen | 210 Dokumen | 140.00% | 150 Dokumen | 0 Dokumen | 0.00 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 132 Laporan | 132 Laporan | 132 Laporan | 132 Laporan | 100% | 132 Laporan | 0 Laporan | 0.00 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% | 2 Laporan | 0 Laporan | 0.00 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 132 Orang | 132 Orang | 132 Orang | 132 Orang | 100% | 132 Orang | 0 Orang | 0.00 |

* 1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah mencakup kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM (Standar Pelayanan Minimal), maupun terhadap IKK (indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta merujuk pada Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian dan Pelaporan Kinerja. Evaluasi dan analisis dilakukan terhadap sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang sebagaimana yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja yang disusun dan disampaikan dalam laporan interim triwulanan kepada Walikota Malang. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat diuraikan pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2.1 - Lampiran TC 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **INDIKATOR** | **SPM/ STANDAR NASIONAL** | **IKK (INDIKATOR KINERJA KUNCI)** | **TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH** | | | | **REALISASI CAPAIAN** | | **PROYEKSI** | | **CATATAN ANALISIS** |
| **Tahun 2023** | **Tahun 2024** | **Tahun 2025** | **Tahun 2026** | **Tahun 2023** | **Tahun 2024** | **Tahun 2025** | **Tahun 2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | - |  | - | 68.0000 | 70.0000 | 72.0000 | 66.4308 | 69.3648 | 70.0000 | 72.0000 |  |
| 2 | Persentase Kontribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Terhadap PAD |  |  |  | 1.39% | 1.41% | 1.43% | 2.06% | 1.88% | 1.41% | 1.43% |  |
| 3 | Nilai SAKIP |  |  | 85 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 90.45 | 90.20 | 90.6 | 90.8 |  |

* 1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 menetapkan 8 (delapan) Arah Kebijakan/Isu Strategis/Prioritas Daerah sebagai berikut:

1. Stunting
2. Kemiskinan
3. Birokrasi Yang Responsive dan Adaptif
4. Daya Saing SDM
5. Perlindungan Sosial dan Daya Beli
6. Tata Kota dan Branding
7. Kemudahan Berinvestasi
8. Pengendalian Inflasi

Dalam mendukung kinerja Tahun I (pertama) RPD Tahun 2024, Badan Keuangan dan Aset Daerah mengampu 2 (dua) strategi/prioritas sebagai Utama yaitu Birokrasi Yang Responsive dan Adaptif dan Daya Saing SDM. Namun Badan Keuangan dan Aset Daerah mengampu 4 (empat) strategi/prioritas daerah lainnya yaitu (1) Stunting (2) Kemiskinan (3) Perlindungan Sosial dan Daya Beli, dan (4) Pengendalian Inflasi, yang didukung dari pendanaan Belanja Tidak Terduga (BTT) bilamana dalam keadaan darurat/mendesak dan tidak/belum direncanakan oleh Perangkat Daerah pengampu.

Selain itu sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku SK-PKD dalam hal ini Kepala BKAD Kota Malang, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD ;
2. Menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD ;
3. Menyusun Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;
4. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah ;
5. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Sebagai tindak lanjut, atas pelaksanaan ketentuan tersebut dan menyikapi dinamika kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan untuk memfasilitasi penyusunan KUA-PPAS/KUA-PPAS Perubahan, Raperda APBD/Perubahan APBD, maka rencana program dan kegiatan serta belanja daerah Kota Malang diarahkan untuk mengurangi berbagai isu strategis antara lain kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pelayanan dasar masyarakat dan lingkungan hidup. Penerapan isu-isu strategis tersebut selanjutnya dijabarkan dalam program kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang sesuai bidang dan urusan masing-masing serta kondisi riil, antara lain :

* + - 1. Pendidikan; adanya tingkat pendidikan penduduk relatif masih rendah, diarahkan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua tanpa diskriminasi terutama masyarakat miskin dan menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan.
      2. Kesehatan; diarahkan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, meningkatkan jumlah jaringan pelayanan kesehatan dan kualitas pusat kesehatan masyarakat, meningkatkan perbaikan sarana dan prasarana serta mewujudkan perumahan sehat dengan sanitasi yang layak dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih.
      3. Lapangan Kerja; kebijakan yang diarahkan untuk mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di sektor informal maupun formal, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenaga- kerjaan.
      4. Pertanian; diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan petani, meningkatkan produktivitas, daya saing, serta pengamanan ketahanan pangan.
      5. Koperasi; diarahkan untuk mengembangkan UKM, mengembangkan usaha skala mikro, memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan, meningkatkan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa serta meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.
      6. Lingkungan Hidup; diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
      7. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik; diarahkan untuk mempercepat perwujudan pola pikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat; mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggungjawab, dan profesional; meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima serta mendorong partisipasi masyarakat untuk merumuskan program dan kebijakan layanan publik.
      8. Kesalehan Sosial; diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina ahlak mulia, budi pekerti, memupuk etos kerja, meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama dan budi pekerti dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, menyelesaikan dan mencegah konflik antar-umat beragama, serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat.
      9. Peran Perempuan dan Kesetaraan Gender; diarahkan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; meningkatkan perbaikan angka indeks pembangunan Gender; terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan anak dan perempuan serta meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
      10. Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga, diarahkan untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama; meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan.
      11. Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminilitas; diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing; meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkoba serta mendorong peningkatan perlindungan dan pengayoman masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan SKPD. maka sejak tahun 2017 pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mengalami penyesuaian terhadap program-program kegiatan dan capaiannya sesuai nomenklatur yang telah ditetapkan. Prinsip Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan disusun berdasarkan urusan pemerintah daerah dan unsur dalam pemerintah daerah untuk menghasilkan keluaran berdasarkan indikator kinerja dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan di daerah. mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yaitu merupakan Sistem Informasi Yang Memuat Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Keuangan Daerah. serta Sistem Pemerintahan Daerah yang lain termasuk Sistem Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan yang kemudian mengalami perubahan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi ,Validasi. dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sebagai implementasi atas peraturan perundang-undangan diatas. Pemerintah Kota Malang menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2022 sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Beberapa faktor penghambat yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran antara lain:

1. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan aset daerah;
2. Sumberdaya Manusia pengelola aset daerah kurang memahami regulasi dan mekanisme pengelolaan aset daerah;
3. Pengamanan terhadap aset daerah baik secara fisik, administrasi dan hukum belum maksimal;
4. Banyaknya aset daerah yang belum didukung dengan dokumen legal formal yang sah.

Sedangkan faktor pendorongnya adalah:

1. Profesionalisme pengelolaan keuangan dan aset daerah yang didukung dengan sistem aplikasi
2. Sistem Informasi Manajemen Yang Terintegrasi
3. Peningkatan Kepercayaan Publik terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
   1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran SKPD, maka pelaksanaan program dan kegiatan mutlak harus dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan target kinerja. Undang-Undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Seiring itu pula perubahan regulasi/peraturan perundang-undangan yang disusun Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah terus berbenah sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Pun rekomendasi BPK RI terkait pemeriksaan atas L/K Pemerintah Daerah menuntut ditindaklanjuti. BKAD selaku entitas pelaporan/ SK-PKD wajib untuk menyajikan pelaporan keuangan daerah yang handal sekaligus melakukan pengamanan terhadap aset daerah penuh ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. sesuai tujuan organisasi yaitu Tercapaianya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD Perangkat Daerah yang telah disusun dengan melakukan analisis kebutuhan antara lain :

1. Belanja penyusunan regulasi penganggaran daerah, penatausahaan keuangan daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Belanja pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
3. Belanja pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi Bendaharawan Umum Daerah;
4. Belanja pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
5. Belanja pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi PPKD selaku SK-PKD;
6. Penganggaran Belanja darurat/mendesak melalui Belanja Tidak Terduga;
7. Penganggaran belanja tim percepatan penatausahaan asset daerah (penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah);
8. Penganggaran belanja Tim Inventarisasi Kepemilikan Tanah Aset Pemerintah Kota Malang. sebagai upaya pengendalian pemanfaatan aset daerah melibatkan unsur intansi vertikal terkait dan Aparatur Penegak Hukum (APH);
9. Belanja pengamanan BMD, meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik BMD berupa papan bicara/papan pengumuman kepemilikan asset dan/atau asset dalam proses penyelesaian hukum, dan pengamanan hukum peningkatan status hukum BMD melalui sertifikasi;
10. Belanja fasilitasi konflik pertanahan dan/atau bangunan aset daerah;
11. Belanja fasilitasi Penilaian Barang Milik Daerah, dalam rangka sewa dan/atau penghapusan;
12. Penganggaran belanja inventarisasi tanah dan bangunan Barang Milik Daerah;
13. Penganggaran belanja verifikasi dan validasi data asset Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai penggunaan dan peruntukannya.

Tabel 2.4.1 - Lampiran TC 31 Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 Kota Malang

| **No.** | **Rancangan Awal RKPD** | | | | | **Hasil Analisis Kebutuhan** | | | | | **Catatan Penting** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan** | **Lokasi Output Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif (Rp.)** | **Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan** | **Lokasi Output Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif (Rp.)** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** |
|  | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** |  |  |  |  | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** |  |  |  |  |  |
|  | **KEUANGAN** |  |  |  | **35,359,410,022** | **KEUANGAN** |  |  |  | **35,359,410,022** |  |
|  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kota Malang** | **Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu** | **100%** | **11,365,627,098.00** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kota Malang** | **Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu** | **100%** | **11,365,627,098.00** |  |
| **Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik** | **100%** | **1,145,525,125.00** | **Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik** | **100%** | **1,145,525,125.00** |  |
| **Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu** | **100%** | **566,373,400.00** | **Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu** | **100%** | **566,373,400.00** |  |
| **Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan** | **100%** | **4,404,083,250.00** | **Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan** | **100%** | **4,404,083,250.00** |  |
|  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Kota Malang | **Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan** | **100%** | **22,345,000.00** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Kota Malang | **Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan** | **100%** | **22,345,000.00** |  |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kota Malang | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | 10,295,000.00 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kota Malang | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | 10,295,000.00 |  |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Malang | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | 12,050,000.00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Malang | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | 12,050,000.00 |  |
|  | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Kota Malang | **Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu** | **100%** | **11,343,282,098.00** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Kota Malang | **Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu** | **100%** | **11,343,282,098.00** |  |
| 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Malang | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 47 Orang/bulan | 11,335,422,098.00 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Malang | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 47 Orang/bulan | 11,335,422,098.00 |  |
| 4 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kota Malang | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 500 Dokumen | 7,860,000.00 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kota Malang | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 500 Dokumen | 7,860,000.00 |  |
|  | **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD** | Kota Malang | **Persentase barang milik daerah yang terinventarisir** | **100%** | **36,310,000.00** | **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD** | Kota Malang | **Persentase barang milik daerah yang terinventarisir** | **100%** | **36,310,000.00** |  |
| 5 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Kota Malang | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 36,310,000.00 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Kota Malang | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 36,310,000.00 |  |
|  | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Kota Malang | **Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian** | **100.00%** | **566,373,400.00** | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Kota Malang | **Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian** | **100.00%** | **566,373,400.00** |  |
| 6 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kota Malang | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 6 Dokumen | 49,889,200.00 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kota Malang | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 6 Dokumen | 49,889,200.00 |  |
| 7 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kota Malang | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 132 Orang | 164,677,400.00 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kota Malang | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 132 Orang | 164,677,400.00 |  |
| 8 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kota Malang | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 80 Orang | 351,806,800.00 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kota Malang | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 80 Orang | 351,806,800.00 |  |
|  | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** |  | **Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan** | **100%** | **3,036,872,100.00** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** |  | **Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan** | **100%** | **3,036,872,100.00** |  |
| 9 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Malang | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 17,047,000.00 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Malang | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 17,047,000.00 |  |
| 10 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Malang | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 540,430,200.00 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Malang | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 540,430,200.00 |  |
| 11 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kota Malang | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 77,000,000.00 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kota Malang | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 77,000,000.00 |  |
| 12 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota Malang | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 462,560,900.00 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota Malang | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 462,560,900.00 |  |
| 13 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kota Malang | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | 35,350,000.00 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kota Malang | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | 35,350,000.00 |  |
| 14 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kota Malang | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 Laporan | 1,904,484,000.00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kota Malang | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 Laporan | 1,904,484,000.00 |  |
|  | **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** |  | **Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD** | **100%** | **644,895,125.00** | **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** |  | **Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD** | **100%** | **644,895,125.00** |  |
| 15 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Malang | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 644,895,125.00 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Malang | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 644,895,125.00 |  |
|  | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** |  | **Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti** | **100%** | **1,367,211,150.00** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** |  | **Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti** | **100%** | **1,367,211,150.00** |  |
| 16 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Malang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 24 Laporan | 228,010,000.00 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Malang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 24 Laporan | 228,010,000.00 |  |
| 17 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Malang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | 103,725,900.00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Malang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | 103,725,900.00 |  |
| 18 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Malang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 100,070,000.00 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Malang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 100,070,000.00 |  |
| 19 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kota Malang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 935,405,250.00 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kota Malang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 935,405,250.00 |  |
|  | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** |  | **Persentase barang milik daerah yang terpelihara** | **100%** | **464,320,000.00** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** |  | **Persentase barang milik daerah yang terpelihara** | **100%** | **464,320,000.00** |  |
| 20 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kota Malang | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 34 Unit | 364,320,000.00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kota Malang | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 34 Unit | 364,320,000.00 |  |
| 21 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kota Malang | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 Unit | 100,000,000.00 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kota Malang | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 Unit | 100,000,000.00 |  |
|  | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** |  | **Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan** | **100%** | **1,464,966,100.00** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** |  | **Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan** | **100%** | **1,464,966,100.00** |  |
|  |  | **Persentase Pelayanan Perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan** | **100%** | **11,377,260,265.00** |  | **Persentase Pelayanan Perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan** | **100%** | **11,377,260,265.00** |  |
|  |  | **Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK** | **100%** | **1,029,149,500.00** |  | **Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK** | **100%** | **1,029,149,500.00** |  |
|  | **Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** |  | **Persentase Perangkat Daerah yang menginput penganggaran tepat waktu dan selaras dengan perencanaan** | **100%** | **1,464,966,100.00** | **Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** |  | **Persentase Perangkat Daerah yang menginput penganggaran tepat waktu dan selaras dengan perencanaan** | **100%** | **1,464,966,100.00** |  |
| 22 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Kota Malang | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 111,460,000.00 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Kota Malang | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 111,460,000.00 |  |
| 23 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Kota Malang | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 108,273,100.00 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Kota Malang | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 108,273,100.00 |  |
| 24 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Kota Malang | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 Dokumen | 261,910,000.00 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Kota Malang | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 Dokumen | 261,910,000.00 |  |
| 25 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Kota Malang | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 Dokumen | 136,590,000.00 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Kota Malang | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 Dokumen | 136,590,000.00 |  |
| 26 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Kota Malang | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 4 Dokumen | 407,580,000.00 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Kota Malang | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 4 Dokumen | 407,580,000.00 |  |
| 27 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Kota Malang | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 132 Orang | 439,153,000.00 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Kota Malang | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 132 Orang | 439,153,000.00 |  |
|  | **Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** |  | **Persentase kesesuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku** | **100%** | **718,939,435.00** | **Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** |  | **Persentase kesesuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku** | **100%** | **718,939,435.00** |  |
| 28 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Kota Malang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 12 Dokumen | 64,629,400.00 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Kota Malang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 12 Dokumen | 64,629,400.00 |  |
| 29 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Kota Malang | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 56 Dokumen | 11,003,000.00 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Kota Malang | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 56 Dokumen | 11,003,000.00 |  |
| 30 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Kota Malang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 12 Dokumen | 55,679,750.00 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Kota Malang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 12 Dokumen | 55,679,750.00 |  |
| 31 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Kota Malang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 12 Dokumen | 82,389,285.00 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Kota Malang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 12 Dokumen | 82,389,285.00 |  |
| 32 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Kota Malang | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 1 Dokumen | 10,280,000.00 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Kota Malang | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 1 Dokumen | 10,280,000.00 |  |
| 33 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Kota Malang | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 190 Orang | 494,958,000.00 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Kota Malang | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 190 Orang | 494,958,000.00 |  |
|  | **Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** |  | **Penyampaian L/K Pemda yang tepat waktu** | **tepat waktu** | **1,029,149,500.00** | **Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** |  | **Penyampaian L/K Pemda yang tepat waktu** | **tepat waktu** | **1,029,149,500.00** |  |
| 34 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Kota Malang | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 7 Laporan | 829,315,800.00 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Kota Malang | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 7 Laporan | 829,315,800.00 |  |
| 35 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Kota Malang | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 54,564,500.00 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Kota Malang | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 54,564,500.00 |  |
| 36 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Kota Malang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 4 Dokumen | 26,130,000.00 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Kota Malang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 4 Dokumen | 26,130,000.00 |  |
| 37 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Kota Malang | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 13,920,000.00 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Kota Malang | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 13,920,000.00 |  |
| 38 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 190 Orang | 105,219,200.00 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 190 Orang | 105,219,200.00 |  |
|  | **Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | Kota Malang | **Persentase terpenuhinya dana darurat dan mendesak** | **100%** | **10,000,000,000.00** | **Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | Kota Malang | **Persentase terpenuhinya dana darurat dan mendesak** | **100%** | **10,000,000,000.00** |  |
| 39 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak |  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 5 Laporan | 10,000,000,000.00 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak |  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 5 Laporan | 10,000,000,000.00 |  |
|  | **Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** | Kota Malang | **Persentase ketersediaan data dalam Implementasi Sistem informasi Pemerintahan Daerah** | **100%** | **658,320,830.00** | **Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** | Kota Malang | **Persentase ketersediaan data dalam Implementasi Sistem informasi Pemerintahan Daerah** | **100%** | **658,320,830.00** |  |
| 40 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 190 Orang | 658,320,830.00 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 190 Orang | 658,320,830.00 |  |
|  | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** |  | **Kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah, gedung dan bangunan** | **15,5M** | **2,846,628,884.00** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** |  | **Kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah, gedung dan bangunan** | **15,5M** | **2,846,628,884.00** |  |
|  |  | **Persentase Laporan BMD SKPD yang sesuai dengan ketentuan** | **100%** | **1,159,796,400.00** |  | **Persentase Laporan BMD SKPD yang sesuai dengan ketentuan** | **100%** | **1,159,796,400.00** |  |
|  | **Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah** |  | **Persentase data Barang Milik Daerah yang akurat sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya** | **100%** | **4,006,425,284.00** | **Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah** |  | **Persentase data Barang Milik Daerah yang akurat sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya** | **100%** | **4,006,425,284.00** |  |
| 41 | Penyusunan Standar Harga | Kota Malang | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 1 Dokumen | 153,080,000.00 | Penyusunan Standar Harga | Kota Malang | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 1 Dokumen | 153,080,000.00 |  |
| 42 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Kota Malang | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | 3,136,000.00 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Kota Malang | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | 3,136,000.00 |  |
| 43 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kota Malang | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | 112,460,000.00 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kota Malang | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | 112,460,000.00 |  |
| 44 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Kota Malang | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 12 Laporan | 171,475,200.00 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Kota Malang | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 12 Laporan | 171,475,200.00 |  |
| 45 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Kota Malang | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 204,409,200.00 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Kota Malang | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 204,409,200.00 |  |
| 46 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Kota Malang | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 3 Laporan | 1,100,619,500.00 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Kota Malang | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 3 Laporan | 1,100,619,500.00 |  |
| 47 | Penilaian Barang Milik Daerah | Kota Malang | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 10 Laporan | 1,387,870,800.00 | Penilaian Barang Milik Daerah | Kota Malang | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 10 Laporan | 1,387,870,800.00 |  |
| 48 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kota Malang | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2 Laporan | 101,520,000.00 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kota Malang | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2 Laporan | 101,520,000.00 |  |
| 49 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Kota Malang | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 150 Dokumen | 64,195,384.00 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Kota Malang | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 150 Dokumen | 64,195,384.00 |  |
| 50 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Kota Malang | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 132 Laporan | 627,696,000.00 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Kota Malang | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 132 Laporan | 627,696,000.00 |  |
| 51 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 132 Orang | 79,963,200.00 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 132 Orang | 79,963,200.00 |  |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan keuangan dan aset daerah, perwakilan perguruan tinggi, Lembaga/otoritas jasa keuangan, instansi vertical serta perwakilan dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Malang di paparkan melalui Forum Perangkat Daerah (FPD) yang dilaksanakan oleh BAPPEDA pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2025 bertempat di Grand Mercure Hotel Malang Mirama. Beberapa catatan penting dihasilkan dalam forum tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Regulasi Penganggaran Daerah
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah Yang Tertib Sesuai Peraturan Perundang-undangan;
3. Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kota Malang dalam rangka pengamanan tanah aset daerah;
4. Inventarisasi tanah dan bangunan yang menjadi aset milik Pemerintah Kota Malang;
5. Integrasi sistem aplikasi pengelolaan keuangan dengan sistem aplikasi Barang Milik Daerah yang di bangun Pemerintah Pusat;
6. Fasilitasi konflik pertanahan dan/atau bangunan aset daerah;
7. Peningkatan PAD dari hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

Secara rinci dijelaskan dalam tabel T-C 32 sebagai berikut:

Tabel 2.5.1 - Lampiran TC 32 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

| No. | Program/Kegiatan | Uraian | Lokasi | Indikator Kinerja | Volume | Besaran (Rp.) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Pengamanan Barang Milik Daerah | * Peningkatan Status Aset Daerah melalui sertifikasi * Pemasangan papan bicara * Penataan dan pemeliharaan arsip surat berharga daerah * Fasilitasi konflik pertanahan/bangunan aset daerah | Kota Malang | * Jumlah bidang lahan aset daerah yang tersertifikasi * Pemasangan papan kepemilikan tanah aset daerah * Pemeliharaan dan penataan arsip * Fasilitasi/pengamanan fisik tanah/bangunan aset daerah yang dikuasai pihak lain | 401 bidang  70 buah  1.701 sertifikat,  1.809 BPKB, 7.381 IP | 1.600.000.000 | untuk capaian indikator 15.86%  untuk capaian indikator 100%  untuk capaian indikator 100% |
| 2 | Inventarisasi Tanah dan Bangunan Aset Daerah | tindak lanjut atas rekomendasi hasil inventarisasi di lapangan | Kota Malang | Jumlah obyek tanah aset daerah yang terinventarisasi | 1.500 obyek | 490.000.000 | untuk capaian indikator 100% |
| 3 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Integrasi sistem aplikasi pengelolaan keuangan dengan sistem aplikasi Barang Milik Daerah | BKAD Kota Malang | Jumlah Software yang terbangun | * SIN ( Single Identification Number)/Data Tunggal BMD berupa Tanah * 1 Software/Aplikasi e-BMD | 460.000.000 | untuk capaian indikator 100% |
| 4 | Integrasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Pengembangan Integrasi dari Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan dan Aset Daerah | BKAD Kota Malang | Jumlah Software yang terbangun | 1 Software | 400.000.000 | untuk capaian indikator 100% |
| 5 | Penyusunan Regulasi Penganggaran Daerah | Penyusunan Ranperda/ Ranperwal Penganggaran Daerah | BKAD Kota Malang | Jumlah Ranperda/Ranperwal | 1 Ranperda dan 4 Ranperwal | 983.760.000 | untuk capaian indikator 100% |

BAB IIII

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, maka pada penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2026 telah mengalami penyesuaian terhadap program-program kegiatan dan capaiannya sesuai nomenklatur yang telah ditetapkan.

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan di daerah, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian mengalami perubahan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sebagai implementasi atas peraturan perundang-undangan diatas, Pemerintah Kota Malang menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah nomor 5 Tahun 2022 pengganti Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka pengendalian jadwal Perencanaan dan Penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Walikota membentuk Tim Percepatan Penyusunan Anggaran Pemdapatan dan Belanja Daerah Melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun 2020. Tim melakukan Langkah-langkah percepatan melalui integrasi proses antara lain:

1. Proses penyusunan Perencanaan pembangunan daerah;
2. Proses pengelolaan keuangan daerah (penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah);
3. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
4. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada satu platform sistem informasi pemerintahan daerah.

Penjadwalan proses Perencanaan, Penganggaran dan Update Harga Satuan Barang sbb:

* Admin Perencanaan (BAPPEDA) mengelola jadwal proses Perencanaan dalam SIPD secara elektronik;
* Admin Keuangan (BKAD) mengelola jadwal proses penganggaran dengan update Standar Harga Satuan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Untuk pemahaman terhadap SIPD, Tim mempelajari fungsi, muatan serta teknis operasi/akses melalui pembelajaran/bimbingan teknis dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri sebelum melakukan pendampingan teknis kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan alat dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi serta pelaporan keuangan daerah yang terdiri atas akun, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening untuk:

1. Neraca meliputi Aset, Kewajiban dan Ekuitas;
2. Penyusunan Anggaran dan LRA meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Laporan Operasional (LO) meliputi Pendapatan-LO dan Beban

Prinsip Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan disusun berdasarkan urusan pemerintah daerah dan unsur dalam pemerintah daerah untuk menghasilkan keluaran berdasarkan indikator kinerja dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

3.2. Tujuan

Dengan telah disahkannya Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024 – 2026, maka disusunlah Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026 yang didalamnya berisi tentang tujuan, sasaran dan kebijakan BKAD untuk periode 3 (tiga) tahun. Badan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan tujuan sebanyak 1 (satu) tujuan dan sasaran sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan indikator sasaran sebanyak 3 (tiga) indikator.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada Visi, Misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Terkait dengan uraian diatas, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan. yaitu :

“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien “

3. 3. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun yang berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mensinkronkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran dan kemampuan anggaran. Memperhatikan hal tersebut maka ditetapkan sasaran organisasi, yaitu :

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah
2. Meningkatnya kualitas pengelolaaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel
3. Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah

Dengan Indikator Sasaran sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP
2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Persentase Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD

Ketiga sasaran dan indikator yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai apabila seluruh pegawai BKAD Kota Malang konsisten dan komitmen bersama-sama, saling bersinergi melaksanakan strategi secara tepat dan sistematis sesuai kemampuan sumber daya yang ada. Hasil analisis sasaran dan dukungan data menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang relevan sebagai prasyarat perbaikan strategi. Mendasari hal ini, untuk tiga tahun mendatang BKAD Kota Malang telah menetapkan suatu strategi yang secara rinci dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan.

3. 4. Program

Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPKD selaku PPKD ( dalam hal ini BKAD ) mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD/ Rancangan Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Mendasari ketentuan tersebut, BKAD dalam menyusun program kegiatannya bersifat reguler, mengkoordinir, memfasilitasi dan mendukung Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja BKAD Kota Malang Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Periode 2024 - 2026 sebagaimana diuraikan pada dokumen Renstra Perangkat Daerah yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah: Program Badan Keuangan dan Aset Daerah dibagi menjadi 3 (tiga) Program yaitu:

* + - 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
      2. Program Pengelolaan Keuangan;
      3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dari 3 (tiga) Program tersebut Program Pengelolaan Keuangan dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi Program Prioritas BKAD dimana program tersebut mempunyai irisan/crosscutting dalam menyelesaikan permasalahan secara kolaborasi antar Perangkat Daerah. Crosscutting terkait dengan 8 (delapan) Arah Kebijakan / Isu Strategis/Prioritas Daerah pada Tahun 2024, Badan Keuangan dan Aset Daerah mengampu 2 (dua) strategi/prioritas sebagai Utama yaitu (1) Birokrasi Yang Responsive dan (2) Adaptif dan Daya Saing SDM. Namun Badan Keuangan dan Aset Daerah mengampu 4 (empat) strategi/prioritas daerah lainnya yaitu (1) Stunting (2) Kemiskinan (3) Perlindungan Sosial dan Daya Beli, dan (4) Pengendalian Inflasi, yang didukung dari pendanaan Belanja Tidak Terduga (BTT) bilamana dalam keadaan darurat/mendesak dan tidak/belum direncanakan oleh Perangkat Daerah pengampu.

1. 5. Kegiatan

Kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah meliputi:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah

3. 6. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan BKAD Kota Malang pada Tahun Anggaran 2026

diusulkan sebesar Rp. 35.359.410.022,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Dua Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari:

1. Belanja Operasional dan Belanja Modal sebesar Rp. 25.359.410.022,00

(termasuk belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 11.028.462.098,00)

1. Belanja Tidak Terduga. sebesar Rp. 10.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.1 Program dan Kegiatan Tahun 2026

|  |  |
| --- | --- |
| **Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan** | **Pagu Indikatif (Rp.)** |
| **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** |  |
| **KEUANGAN** | **35,359,410,022.00** |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **17,481,608,873.00** |
| **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **22,345,000.00** |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10,295,000.00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12,050,000.00 |
| **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **11,343,282,098.00** |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 11,335,422,098.00 |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 7,860,000.00 |
| **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD** | **36,310,000.00** |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 36,310,000.00 |
| **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **566,373,400.00** |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 49,889,200.00 |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 164,677,400.00 |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 351,806,800.00 |
| **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **3,036,872,100.00** |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 17,047,000.00 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 540,430,200.00 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 77,000,000.00 |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 462,560,900.00 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 35,350,000.00 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1,904,484,000.00 |
| **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **644,895,125.00** |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 644,895,125.00 |
| **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1,367,211,150.00** |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 228,010,000.00 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 103,725,900.00 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100,070,000.00 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 935,405,250.00 |
| **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **464,320,000.00** |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 364,320,000.00 |
| Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100,000,000.00 |
| **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **13,871,375,865.00** |
| **Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | **1,464,966,100.00** |
| Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 111,460,000.00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 108,273,100.00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 261,910,000.00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 136,590,000.00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 407,580,000.00 |
| Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 439,153,000.00 |
| **Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **718,939,435.00** |
| Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 64,629,400.00 |
| Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 11,003,000.00 |
| Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 55,679,750.00 |
| Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 82,389,285.00 |
| Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 10,280,000.00 |
| Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 494,958,000.00 |
| **Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **1,029,149,500.00** |
| Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 829,315,800.00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 54,564,500.00 |
| Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 26,130,000.00 |
| Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 13,920,000.00 |
| Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 105,219,200.00 |
| **Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **10,000,000,000.00** |
| Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 10,000,000,000.00 |
| **Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** | **658,320,830.00** |
| Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 658,320,830.00 |
| **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **4,006,425,284.00** |
| **Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **4,006,425,284.00** |
| Penyusunan Standar Harga | 153,080,000.00 |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 3,136,000.00 |
| Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 112,460,000.00 |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah | 171,475,200.00 |
| Inventarisasi Barang Milik Daerah | 204,409,200.00 |
| Pengamanan Barang Milik Daerah | 1,100,619,500.00 |
| Penilaian Barang Milik Daerah | 1,387,870,800.00 |
| Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 101,520,000.00 |
| Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 64,195,384.00 |
| Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 627,696,000.00 |
| Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 79,963,200.00 |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan pada BAB II diatas serta tindaklanjut atas masukan stakeholder pada Forum Perangkat Daerah, maka dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah yang telah disusun dengan melakukan analisis kebutuhan atas perencanaan penganggaran pada Tahun 2026 antara lain :

1. Belanja penyusunan regulasi penganggaran daerah, penatausahaan keuangan daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Belanja pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
3. Belanja pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi Bendaharawan Umum Daerah;
4. Belanja pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
5. Belanja pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi PPKD selaku SK-PKD;
6. Penganggaran Belanja darurat/mendesak melalui Belanja Tidak Terduga;
7. Penganggaran belanja tim percepatan penatausahaan asset daerah (penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah);
8. Penganggaran belanja Tim Inventarisasi Kepemilikan Tanah Aset Pemerintah Kota Malang. sebagai upaya pengendalian pemanfaatan aset daerah melibatkan unsur intansi vertikal terkait dan Aparatur Penegak Hukum ( APH );
9. Belanja pengamanan BMD, meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik BMD berupa papan bicara/papan pengumuman kepemilikan asset dan/atau asset dalam proses penyelesaian hukum, dan pengamanan hukum peningkatan status hukum BMD melalui sertifikasi;
10. Belanja fasilitasi konflik pertanahan dan/atau bangunan aset daerah;
11. Belanja fasilitasi Penilaian Barang Milik Daerah. dalam rangka sewa dan/atau penghapusan;
12. Penganggaran belanja inventarisasi tanah dan bangunan Barang Milik Daerah
13. Penganggaran belanja verifikasi dan validasi data asset Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai penggunaan dan peruntukannya.

Selanjutnya program, kegiatan dan indikator program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif tahun anggaran 2026, kelompok sasaran dan Pagu indikatif prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2027 Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat disajikan sebagaimana pada tabel 4.1 tentang Lampiran TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 berikut:

Tabel 4.1 Lampiran TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

| Kode | | | | | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2026 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Tolok Ukur | Target |
|  |  |  |  |  | Badan Keuangan dan Aset Daerah | | | | | | | | **35,359,410,022.00** |  |  |  |  | 128.378.787.277,00 |
| 5 |  |  |  |  | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | **35,359,410,022.00** |  |  |  |  | 128.378.787.277,00 |
| 5 | 02 |  |  |  | KEUANGAN | | | | | | | | **17,481,608,873.00** |  |  |  |  | 128.378.787.277,00 |
| 5 | 02 | 01 |  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | **17,481,608,873.00** |  |  |  |  | 16.984.155.413,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | **22,345,000.00** |  |  |  |  | 56.131.146,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % 100 % | 10 Dokumen | 100 % | 10,295,000.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | 48.738.546,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yg disusun tepat waktu | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % 100 % | 3 Laporan | 100 % | 12,050,000.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | 7.392.600,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 |  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **11,343,282,098.00** |  |  |  |  | 10.199.412.784,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % 100 % | 47 Orang/bulan | 100 % | 11,335,422,098.00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 57 Orang/bulan | 10.097.698.173,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % 100 % | 500 Dokumen | 100 % | 7,860,000.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 500 Dokumen | 101.714.611,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.03 |  | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **36,310,000.00** |  |  |  |  | 51.159.900,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Persentase barang milik daerah yang terinventarisir | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % 100 % | 1 Dokumen | 100 % | 36,310,000.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 51.159.900,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 |  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **566,373,400.00** |  |  |  |  | 1.015.375.608,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % 100 % | 6 Dokumen | 100 % | 49,889,200.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 6 Dokumen | 184.115.700,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % 100 % | 132 Orang | 100 % | 164,677,400.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 132 Orang | 185.991.600,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % 100 % | 80 Orang | 100 % | 351,806,800.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 80 Orang | 645.268.308,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **3,036,872,100.00** |  |  |  |  | 2.746.327.590,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % 100 % | 1 Paket | 100 % | 17,047,000.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 13.197.789,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % 100 % | 6 Paket | 100 % | 540,430,200.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 965.190.843,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % 100 % | 1 Paket | 100 % | 77,000,000.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 31.449.408,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % 100 % | 2 Paket | 100 % | 462,560,900.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 158.685.600,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % 100 % | 3 Dokumen | 100 % | 35,350,000.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | 90.420.600,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % 100 % | 120 Laporan | 100 % | 1,904,484,000.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 Laporan | 1.487.383.350,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 |  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **644,895,125.00** |  |  |  |  | 716.007.720,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % 100 % | 5 Unit | 100 % | 644,895,125.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | 716.007.720,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1,367,211,150.00** |  |  |  |  | 1.012.122.305,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % 100 % | 24 Laporan | 100 % | 228,010,000.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 24 Laporan | 441.737.820,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % 100 % | 3 Laporan | 100 % | 103,725,900.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | 98.769.909,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % 100 % | 2 Laporan | 100 % | 100,070,000.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 140.009.513,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % 100 % | 1 Laporan | 100 % | 935,405,250.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 331.605.063,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 |  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **464,320,000.00** |  |  |  |  | 1.187.618.360,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Persentase barang milik daerah yang terpelihara | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % 100 % | 34 Unit | 100 % | 364,320,000.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 34 Unit | 1.058.634.972,00 |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Persentase barang milik daerah yang terpelihara | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % 100 % | 1 Unit | 100 % | 100,000,000.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 128.983.388,00 |
|  |  |  |  |  | **KEUANGAN** | | | | | | | | **17,877,801,149.00** |  |  |  |  |  |
| 5 | 02 | 02 |  |  | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | | | | | | **13,871,375,865.00** |  |  |  |  | 106.236.521.348,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 |  | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | | | | | | | | **1,464,966,100.00** |  |  |  |  | 2.148.496.131,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | Persentase Perangkat Daerah yang menginput penganggaran tepat waktu dan selaras dengan perencanaan | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % | 2 Dokumen | 100 % | 111,460,000.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 140.736.900,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | Persentase Perangkat Daerah yang menginput penganggaran tepat waktu dan selaras dengan perencanaan | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % | 2 Dokumen | 100 % | 108,273,100.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 128.685.741,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Persentase Perangkat Daerah yang menginput penganggaran tepat waktu dan selaras dengan perencanaan | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % | 2 Dokumen | 100 % | 261,910,000.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 Dokumen | 400.698.900,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Persentase Perangkat Daerah yang menginput penganggaran tepat waktu dan selaras dengan perencanaan | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % | 2 Dokumen | 100 % | 136,590,000.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 Dokumen | 177.294.750,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Persentase Perangkat Daerah yang menginput penganggaran tepat waktu dan selaras dengan perencanaan | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % | 4 Dokumen | 100 % | 407,580,000.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 4 Dokumen | 1.091.973.600,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Persentase Perangkat Daerah yang menginput penganggaran tepat waktu dan selaras dengan perencanaan | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % | 132 Orang | 100 % | 439,153,000.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 132 Orang | 209.106.240,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 |  | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | | | | | | | | **718,939,435.00** |  |  |  |  | 1.246.338.304,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Persentase Pelayanan Perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Persentase kesesuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % | 12 Dokumen | 100 % | 64,629,400.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 12 Dokumen | 480.654.198,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Persentase Pelayanan Perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Persentase kesesuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % | 56 Dokumen | 100 % | 11,003,000.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 56 Dokumen | 125.755.230,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Persentase Pelayanan Perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Persentase kesesuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % | 12 Dokumen | 100 % | 55,679,750.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 12 Dokumen | 62.958.923,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Persentase Pelayanan Perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Persentase kesesuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % | 12 Dokumen | 100 % | 82,389,285.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 12 Dokumen | 59.517.923,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Persentase Pelayanan Perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Persentase kesesuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % | 1 Dokumen | 100 % | 10,280,000.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 1 Dokumen | 47.661.291,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Persentase Pelayanan Perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Persentase kesesuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % | 190 Orang | 100 % | 494,958,000.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 190 Orang | 469.790.739,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 |  | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | | | | | | | | **1,029,149,500.00** |  |  |  |  | 2.098.031.979,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | Penyampaian L/K Pemda yang tepat waktu | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % | 7 Laporan | tepat waktu - | 829,315,800.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 7 Laporan | 1.100.656.020,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Penyampaian L/K Pemda yang tepat waktu | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % | 2 Dokumen | tepat waktu - | 54,564,500.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 129.648.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Penyampaian L/K Pemda yang tepat waktu | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % | 4 Dokumen | tepat waktu - | 26,130,000.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 4 Dokumen | 84.362.775,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Penyampaian L/K Pemda yang tepat waktu | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % | 1 Dokumen | tepat waktu - | 13,920,000.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 39.710.250,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Penyampaian L/K Pemda yang tepat waktu | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % | 190 Orang | tepat waktu - | 105,219,200.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 190 Orang | 743.654.934,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 |  | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | | | | | | | | **10,000,000,000.00** |  |  |  |  | 100.000.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Persentase Pelayanan Perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Persentase terpenuhinya dana darurat dan mendesak | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % | 5 Laporan | 100 % | 10,000,000,000.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 5 Laporan | 100.000.000.000,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.05 |  | **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** | | | | | | | | **658,320,830.00** |  |  |  |  | 743.654.934,00 |
| 5 | 02 | 02 | 2.05 | 0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Persentase Pelayanan Perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan data dalam Implementasi Sistem informasi Pemerintahan Daerah | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % 100 % | 190 Orang | 100 % | 658,320,830.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 190 Orang | 743.654.934,00 |
| 5 | 02 | 03 |  |  | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | | | | | | **4,006,425,284.00** |  |  |  |  | 5.158.110.516,00 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 |  | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | | | | | | | | **4,006,425,284.00** |  |  |  |  | 5.158.110.516,00 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Standar Harga | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Persentase Laporan BMD SKPD yang sesuai dengan ketentuan | Jumlah Standar Harga yang Disusun | Persentase data Barang Milik Daerah yang akurat sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.5 Miliar Rupiah 100 % | 1 Dokumen | 100 % | 153,080,000.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 1 Dokumen | 22.851.071,00 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Persentase Laporan BMD SKPD yang sesuai dengan ketentuan | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Persentase data Barang Milik Daerah yang akurat sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.5 Miliar Rupiah 100 % | 1 Dokumen | 100 % | 3,136,000.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | 31.895.850,00 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase data Barang Milik Daerah yang akurat sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.5 Miliar Rupiah 100 % | 2 Dokumen | 100 % | 112,460,000.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | 81.784.800,00 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Persentase Laporan BMD SKPD yang sesuai dengan ketentuan | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | Persentase data Barang Milik Daerah yang akurat sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.5 Miliar Rupiah 100 % | 12 Laporan | 100 % | 171,475,200.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 12 Laporan | 391.111.830,00 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Persentase Laporan BMD SKPD yang sesuai dengan ketentuan | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | Persentase data Barang Milik Daerah yang akurat sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.5 Miliar Rupiah 100 % | 1 Laporan | 100 % | 204,409,200.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 224.631.810,00 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | Persentase data Barang Milik Daerah yang akurat sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.5 Miliar Rupiah 100 % | 3 Laporan | 100 % | 1,100,619,500.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 3 Laporan | 2.011.999.609,00 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | Persentase data Barang Milik Daerah yang akurat sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.5 Miliar Rupiah 100 % | 10 Laporan | 100 % | 1,387,870,800.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 10 Laporan | 1.121.414.352,00 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase data Barang Milik Daerah yang akurat sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.5 Miliar Rupiah 100 % | 2 Laporan | 100 % | 101,520,000.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2 Laporan | 183.194.400,00 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Persentase data Barang Milik Daerah yang akurat sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.5 Miliar Rupiah 100 % | 150 Dokumen | 100 % | 64,195,384.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 150 Dokumen | 474.516.120,00 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Persentase Laporan BMD SKPD yang sesuai dengan ketentuan | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Persentase data Barang Milik Daerah yang akurat sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.5 Miliar Rupiah 100 % | 132 Laporan | 100 % | 627,696,000.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 132 Laporan | 428.960.166,00 |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Persentase data Barang Milik Daerah yang akurat sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya | Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.5 Miliar Rupiah 100 % | 132 Orang | 100 % | 79,963,200.00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 132 Orang | 132.914.952,00 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **35,359,410,022.00** |  | | | | **128.378.787.277,00** |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2026, merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta target dan sasaran pembangunan yang dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Malang Tahun 2026. Selain itu Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang mempunyai fungsi-fungsi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Tahun Anggaran 2026

.

Renja-Perangkat Daerah sebagai salah satu alat perencanaan merupakan alat perencana manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan;
2. Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan;
3. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang disusun;
4. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian sasaran strategis.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renja-Perangkat Daerah dalam penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari tujuan dan sasaran Perangkat Daerah melalui mekanisme Forum Perangkat Daerah yang melibatkan stakeholder/pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan rancangan Rencana Kerja, sehingga diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang maupun dengan K/L/D/I maupun masyarakat/pemangku kepentingan.